

Transformasi Masyarakat Kampung Pelangi Semarang

Romadi¹✉

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2019
Disetujui april 2019
Dipublikasikan April 2019

Keywords:
pemberdayaan;
pengabdian;
komitmen;
konservasi

Abstrak

Berdasarkan observasi dan komunikasi awal dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Randusari, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa permukiman kumuh dan perilaku sosial masyarakat di sana perlu dirubah. Kesepakatan diambil, dengan jalan pemberdayaan masyarakat persoalan tersebut akan coba diurai. Kegiatan pemberdayaan ini nantinya akan bermuara pada pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat Kelurahan Randusari. Wilayah tersebut merupakan salah satu contoh model pembangunan kota yang cukup berhasil, ditinjau dari perubahan lingkungannya saat ini wilayah tersebut sudah menjadi hijau dan ramah masyarakat. Semula wilayah ini merupakan kampung yang kumuh dan sangat tidak layak bagi para pendatang, sebagian warganya terjerat kemiskinan. Namun keadaan berubah oleh karena komitmen bersama, pengabdian ini ingin mengawal proses pembangunan kualitas hidup masyarakat seperti dimaksud di atas dengan mengadakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal itu juga bermaksud menggugah semangat masyarakat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka sekaligus menguatkan kapasitas mereka untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Dalam hal ini pemahaman tentang konservasi penting diberikan seperti apa yang telah Tim Pengabdian berikan.

PENDAHULUAN

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Berbagai upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya yaitu, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang

membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Permukiman kumuh perkotaan telah menjadi masalah global. Pada 2015 lalu untuk pertama kali jumlah penduduk dunia di perkotaan telah melampaui batas psikologis 50 persen dari penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, pada 2010 penduduk perkotaan telah mencapai 58 persen dan diperkirakan pada 2025 akan mencapai 68 persen. Diyakini dengan semakin banyak penduduk perkotaan, maka semakin besar luasan permukiman kumuhnya. Data Indonesia menegaskan hal ini. Hal tersebut terlihat dari penambahan luasan permukiman kumuh sedikitnya 3.000 hektar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi 55.000 hektar (Dinas Perkotaan Provinsi Jawa Tengah, 2016).

Permukiman kumuh perkotaan telah menjadi isu global ditandai dengan keberadaan beberapa kesepakatan internasional. Antara lain Agenda 21 tentang pembangunan berkelanjutan dan Agenda Habitat. Indonesia telah ikut bersepakat untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara bertahap, khususnya terkait dengan permukiman. Komitmen Indonesia dalam pelaksanaan Agenda Habitat

✉ Corresponding author
Email : romadi@mail.unnes.ac.id

yang diprakarsai oleh UNCHS semakin konkrit dengan Deklarasi Habitat-II (Deklarasi Istanbul) yang menegaskan masalah hunian merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan merupakan hak semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (Shelter for All).

Disamping itu di dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II juga telah dinyatakan perlunya pembangunan yang mengedepankan strategi pemberdayaan (*enabling strategy*) di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Komitmen global terbaru adalah Target Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) dan Deklarasi "*Cities Without Slums Initiative*". Keduanya sama-sama mengamanatkan pentingnya upaya pewujudan daerah perkotaan yang terbebas dari permukiman kumuh.

Di Kota Semarang Perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilakukan diantaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, perbaikan kampung yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi, penyediaan sarana MCK, bak sampah, dan penyediaan air bersih. Program ini didukung konsep asas tri daya, yaitu pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran maupun kemampuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Program ini dimulai sejak tahun 2001 dengan sasaran permukiman kumuh dan masyarakat miskin, melalui pengembangan kegiatan perencanaan dan pengelolaan dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat secara optimal. Masyarakat didampingi oleh konsultan dan tenaga penggerak masyarakat, ikut berpartisipasi dalam menyusun *Community Action Plan* (CAP) berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Lingkungan permukiman kumuh berdasarkan lokasi dapat digolongkan kumuh nelayan, kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi, kumuh pusat kota, kumuh pinggiran kota, kumuh kawasan pariwisata, kumuh daerah rawan bencana, kumuh tepian sungai dan danau. Selain itu, tingkat kekumuhan lingkungan satu berbeda dengan yang lainnya karena terkait dengan karakteristik lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh, permukiman tradisional di daerah Bali dataran sudah ada yang mengarah berkarakteristik kota, demikian juga permukiman tradisional di daerah pegunungan kendatipun tingkat gradasinya berbeda. Dari gambaran tersebut diatas, menunjukkan permukiman kumuh sudah tersebar diberbagai desa/kelurahan, dan menunjukkan 16,81 % dari 666 desa/kelurahan dinyatakan sebagai lingkungan permukiman kumuh.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan umumnya dilakukan oleh masyarakat, kecuali lingkungan permukiman kumuh yang penanganannya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Peningkatan kualitas lingkungan yang dilakukan masyarakat perkotaan maupun perdesaan sangat bervariasi sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Lingkungan permukimannya tidaklah terlepas dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Menurut Naya Sujana (1994:51), manusia Bali dilihat dari perspektif mikro dan individual memiliki perwujudan "variabilitas yang sangat majemuk" yang sifat-sifatnya multi-dimensional antara lain, sebagai manusia religius, manusia budaya, manusia sosial, manusia simbolis, manusia estetis, manusia politis, dan manusia ekonomis. Variabilitas majemuk umumnya kita jumpai pada masyarakat perkotaan atau kawasan-kawasan pariwisata yang berkembang pesat. Pada daerah ini terjadi keberagaman etnis, sosial, budaya, ekonomi. Upaya pemberdayaan di dalam suatu masyarakat yang sangat kompleks seperti ini, memerlukan pendekatan dari berbagai sisi.

Kelurahan Randusari yang terletak di wilayah administrasi Semarang Selatan merupakan salah satu kawasan yang masih kumuh di Bantaran Sungai Semarang. Walaupun sudah berupaya dipercantik oleh Pemerintah Kota dengan menjadikannya objek wisata kampung pelangi, namun etika publik dan karakter masyarakat belum banyak berubah dan beranjak dari sifat dan sikap lama masyarakat penghuni permukiman kumuh. Wawancara pada 1 Desember 2017 dengan Lurah Randusari menghasilkan gambaran bahwa masyarakat butuh diberdayakan dalam mendukung upaya pemerintah. Di sini pemerintah tidak dapat bergerak sendiri, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan guna menyokong usaha pembentukan kampung wisata yang sehat dan bersih sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kelurahan Randusari yang selama ini masih tergolong rendah.

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di permukiman kumuh sudah pernah diteliti oleh Ruhaida dan Sunarti (2012) dari Universitas Diponegoro. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa permukiman kumuh dan kualitas hidup masyarakat tidak mudah diubah hanya menggunakan konsep perubahan lingkungan. Diperlukan satu pemberdayaan sumber daya yang ada. Pemberdayaan ini memiliki konsekuensi merubah budaya dan merubah pandangan dunia masyarakat dari yang kotor menuju yang bersih, dari yang kumuh menuju yang tertata. Upaya pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, dan Bimtek mendukung kebijakan pemerintah cukup efektif dilakukan untuk merubah wajah permukiman yang kumuh menjadi permukiman yang tertata.

Persoalan serius dalam mengubah wajah permukiman kumuh menjadi permukiman yang tertata ada pada proses penyadaran masyarakat. Kelurahan Randusari melalui bantuan dan program pemerintah telah berubah secara fisik, tetapi perilaku sosial masyarakatnya belum berubah. Masih banyak masyarakat yang hidup tidak sehat di dalam rumah maupun di sekitar rumah. Perilaku ini tidak dapat ditinggalkan, perlu ada program khusus yang dirancang untuk dapat merubah perilaku sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di permukiman kumuh Kelurahan Randusari.

Berdasarkan observasi dan komunikasi awal dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Randusari, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa permukiman kumuh dan perilaku sosial masyarakat di sana perlu dirubah. Kesepakatan diambil, dengan jalan pemberdayaan masyarakat persoalan tersebut akan coba diurai. Kegiatan pemberdayaan ini nantinya akan bermuara pada pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat Kelurahan Randusari

Terkait penjelasan diatas ada beberapa identifikasi masalah yang dapat kami sampaikan yaitu: (1) Pengetahuan masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan yang perlu disosialisasikan ulang dengan inovasi; (2) Masyarakat harus berubah taraf hidupnya menjadi lebih baik, karena Kelurahan Randusari merupakan kelurahan terkumuh di Semarang Selatan, terutama dapat diamati dari ketersediaan air bersih di sana; (3) Masyarakat Kelurahan Randusari secara umum belum memiliki bayangan bagaimana menjadi warga yang tinggal di Kampung Wisata; (4) Pemerintah desa tidak punya cukup anggaran untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas; (5) Masyarakat tidak terarah dan ketrampilan masyarakat yang kurang dilatih untuk mendukung program-program pemerintah di Kota Semarang, dengan mewujudkan "Kota tanpa Permukiman Kumuh" seperti yang digagas dalam *Milennium Development Goals/MDGs*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan masyarakat di Indonesia bukan suatu hal yang baru. Hal ini karena sejak mencapai kemerdekaan, istilah pembangunan mendapat tempat yang sangat besar dalam pembentukan Negara bangsa. Pada saat dinamika pembangunan demikian rancaknya pada masa

orde baru, pengembangan masyarakat mengambil posisi dan kontribusi penting. Meski demikian, pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian karena kendali pembangunan banyak berasal dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan (*top down*). Setelah orde baru berakhir dan era reformasi dimulai, dimana kebebasan dan hak asasi manusia menjadi primadona setidaknya dalam wacana pembangunan maka tema-tema seperti pemberdayaan, penguatan kapasitas, kelembagaan lokal, kearifan lokal, modal sosial dan inisiatif lokal demikian bergema dan mewarnai diskusi akademik mengenai pembangunan dan pengembangan masyarakat. Sayangnya tema-tema itu masih banyak dibahas dalam diskusi daripada diimplementasikan dalam kebijakan dan program pembangunan nasional, daerah maupun di tingkat masyarakat local (*grassroots*). Pembahasan dalam diskusi-pun sering sepotong-potong karena informasi berkenaan dengan tema-tema itu masih sangat terbatas.

Apa yang dimaksud ketidakberdayaan (*powerlessness*). Ketidakberdayaan dan *empowerment* sangat terkait dengan motivasi dan proses belajar. Oleh kerananya muncul teori ketidakberdayaan yang dipelajari (*learned helplessness*) dari Seligman (1976) yang meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari yang ditemukan pada hewan-hewan percobaan adalah analogi dari depresi reaktif pada manusia. Pada manusia, ketidakberdayaan yang dipelajari itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikologi yang menyertakan hambatan atau gangguan motivasi, dan hal itu semestinya menjadi target intervensi pekerjaan sosial. Dengan intervensi yang dilakukan maka pemberdayaan dapat dicapai. Pemberdayaan itu sendiri dapat dilihat sebagai proses dan juga sebagai hasil intervensi.

Pengembangan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ada kerancuan terminologi untuk merujuk pengembangan masyarakat yang ditunjukkan dari beberapa istilah yang ada seperti; *Community Work, Community Development, Community Organization, Community Action, Community Practice, dan Community Change* yang mempunyai makna dan tujuan yang sama. Intinya, pengembangan masyarakat merupakan suatu penggunaan berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan integrasi diantaranya bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat yang terorganisir.

Untuk itu maka pengembangan masyarakat harus didasarkan pada asumsi, nilai dan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat memberdayakan masyarakat berdasarkan inisiatif, kemampuan dan partisipasi mereka sendiri. Jelaslah bahwa partisipasi masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dari berbagai keberhasilan program pengembangan masyarakat di berbagai Negara. Untuk itu maka syaratnya partisipasi masyarakat akan terwujud jika masyarakat secara sukarela berpartisipasi dengan cara; masyarakat diberi kebebasan berpartisipasi, adanya kemampuan masyarakat berpartisipasi dan adanya peluang serta kesempatan berpartisipasi.

Pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dibedakan berdasarkan sifat, yaitu konsultatif dan kemitraan. Dalam partisipasi masyarakat dengan pola hubungan konsultatif, anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di pembuat keputusan. Manakala partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, anggota masyarakat merupakan mitra yang sejajar kedudukannya dengan pembuat keputusan. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Partisipasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan masyarakat. Oleh karena partisipasi mempunyai lebih banyak kelebihan dalam pengembangan masyarakat maka partisipasi masyarakat perlu dikembangkan. Salah satu strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif anggota masyarakat adalah melalui pendekatan kelompok. Melalui partisipasi terutama menggunakan media kelompok dalam masyarakat maka pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat. Terlebih lagi jika pemberdayaan dalam rangka partisipasi masyarakat didasari oleh kekuatan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri mereka sendiri.

Kegagalan pelaksanaan pengembangan masyarakat. Beliau merujuk pengembangan masyarakat sebagai sebuah program yang dilaksanakan dalam masyarakat. Kegagalan tersebut menurutnya lebih disebabkan program pengembangan masyarakat tidak memenuhi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang seharusnya. Partisipasi masyarakat terbatas pada elit masyarakat yang mampu dan berkesempatan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena partisipasi yang domi-

nan terjadi pada tingkat elit lokal maka program pengembangan masyarakat tidak dapat diakses atau dimanfaatkan secara optimal oleh sasaran program. Dewasa ini pula, pengembangan masyarakat sebagai sebuah program seringkali hanya dilaksanakan untuk tujuan dan alasan politik sehingga kerap kali tidak terdapat kontinuitas pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Itu artinya program pengembangan masyarakat dilaksanakan secara *parsial* tanpa ada upaya kritis dan serius mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan

Strategi pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan pada dasarnya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Titik berat pendidikan non formal adalah pada aspek afeksi yang diikuti aspek keterampilan dan kognisi. Penerapan strategi pendidikan non formal adalah untuk mendayagunakan berbagai peluang baru yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang untuk memberdayakan masyarakat.

Pentingnya pendidikan khususnya pendidikan orang dewasa dalam rangka pemberdayaan. Pendidikan orang dewasa pada hakekatnya penguatan kapasitas (*capacity building*) orang agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memberdayakan diri mereka sendiri dan pada gilirannya memberdayakan masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat umumnya ditentukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu pendidikan orang dewasa sangat penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Orang dewasa mempunyai pengalaman dan kesiapan untuk belajar dan memiliki orientasi terhadap pemecahan masalah dan tantangan kehidupannya. Belajar bagi orang dewasa mencakup perubahan pada aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pemberdayaan dengan menggunakan keluarga miskin sebagai unit analisisnya. Menurutnya, pemberdayaan keluarga merupakan upaya strategis dan menentukan kelancaran serta keberlangsungan program pengembangan masyarakat. Oleh karena itu pendekatan yang diterapkan harus mampu menciptakan transformasi sosial yang mengacu kepada keterikatan dan kepadanan berbagai kepentingan. Arah dari transformasi sosial tersebut diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi keluarga guna memperkuat kualitas sumberdaya yang dimiliki. Strategi dasar

yang digunakan untuk memberikan kemampuan keluarga melalui proses pemberdayaan dan keberdayaan ialah dengan melakukan intervensi terhadap sistem sosial yang ada. Intervensi yang dilakukan harus diarahkan pada unit sosial yang memiliki keterkaitan langsung terhadap isu sosial yang berkembang. Artinya, unsur-unsur yang berpengaruh terhadap keberdayaan keluarga melalui proses pemberdayaan harus difungsikan dengan demikian keluarga akan dapat berperan kembali melalui interaksi diantara unsur-unsur tersebut dengan keluarga.

Pemberdayaan dari sisi program anti kemiskinan. Menurut beliau, program anti kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah dalam merespon krisis sosial ekonomi yang melanda masyarakat pada tahun 1997 beragam bentuknya. Diantaranya yang dikenal dengan nama program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), subsidi beras miskin, subsidi BBM dan lain sebagainya. Dalam beberapa hal program tersebut telah berusaha untuk menjangkau seluruh sasaran, yaitu masyarakat miskin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa program tersebut juga mengalami hambatan dalam arti tidak seluruh sasaran bisa terjangkau, disamping itu kelangsungan program itu juga terhambat, karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa program tersebut merupakan hadiah/hibah dari pemerintah, sehingga untuk kelanjutannya mereka sangat menggantungkan diri pada kemurahan hati pemerintah daripada mengembangkan inisiatif sendiri. Program anti kemiskinan selain yang berasal dari pemerintah, adapula yang merupakan inisiatif masyarakat yang antara lain juga digerakkan oleh LSM. Program tersebut biasanya berakar dari masyarakat yang bersangkutan dan pelaksanaannya menggunakan teknik partisipatif yang mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah mereka. Wadah dari kegiatan tersebut biasanya menggunakan kelompok lokal yang sudah berakar di wilayahnya seperti kelompok arisan, koperasi dan sebagainya.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selalu berkaitan dengan kelembagaan masyarakat. Istilah lembaga (*institution*) dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*) atau pembinaan kelembagaan (*institutional building*) diartikan beragam menurut kacamata masing-masing. Namun secara umum, pengembangan kelembagaan didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan peng-

gunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Proses ini dapat secara internal digerakan oleh manajer sebuah lembaga atau dicampurtangani dan dipromosikan oleh pemerintah atau oleh badan-badan pembangunan. Tujuan utama pengembangan kelembagaan adalah mengefektifkan penggunaan sumberdaya di suatu negara misalnya, suatu tujuan utama bagi upaya pembangunan dan menjadi sangat mendesak dalam mengatasi krisis multidimensional dewasa ini. dikarenakan pengembangan kelembagaan merupakan proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma, standar, dan nilai-nilai dari dalam masyarakat.

Terkait dengan pengembangan kelembagaan, pengembangan kapasitas individu dan keberfungsian sosial individu perlu diberi perhatian. Pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai jika kapasitas dan keberfungsian sosial individu anggota masyarakat tidak meningkat. Mengkaitkan pengembangan kapasitas individu dengan keberfungsian sosial. Individu yang tanpa memiliki kapasitas maka diyakini tidak dapat berfungsi sosial yang pada gilirannya tidak berdaya. Konsep keberfungsian sosial merujuk pada kapasitas dan kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Pengembangan kapasitas pula harus dipahami sebagai suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien; yaitu sebagai strategi untuk meningkatkan daya dukung kelembagaan dalam mengantisipasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Adapun strategi pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut, dapat dikaji melalui dimensi-dimensi kultural, struktural, maupun interaksional.

Pengembangan modal sosial dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Modal sosial itu merupakan fondasi sekaligus sasaran pembangunan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Institusi publik, baik negara dan NGO, menghadapi tantangan, bagaimana mempermudah keterkaitan diantara masyarakat dengan pelaku lain untuk memperbaiki kapasitas mereka merespon kesempatan dan resiko. Intervensi luar harus peka terhadap sifat dasar organisasi lokal, untuk menjamin bahwa intervensi ini tidak merusak kearifan lokal, memperkuat hubungan sosial dan kelembagaan masyarakat lokal sehingga modal sosial dapat terwujud.

Modal sosial juga ada pada kelompok-ke-

lompok masyarakat termasuk kelompok pekerja informal. Kelompok menempati posisi yang sangat penting bahkan diharapkan menjadi pemeran utama dalam pengembangan masyarakat. Kelompok masyarakat pula yang berperan dalam mengontrol keputusan, proyek atau program, maupun kebijakan yang berpengaruh langsung dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, kelompok dapat menjadi *filter* dan sekaligus sebagai katalisator dari setiap proses perubahan terutama yang berasal dari luar kelompok mereka. Kelompok pekerja informal misalnya dapat merupakan modal sosial suatu masyarakat yang bias diandalkan sebagai kekuatan sosial berupa energi sosial yang tidak pernah lekang dalam masyarakat.

Pengembangan masyarakat seringkali tidak dapat berjalan mulus. Konflik merupakan fenomena yang acapkali menyertai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ekplorasi pengelolaan konflik sebagai cara untuk mengatasi agar konflik tidak menimbulkan dampak yang luas. Pengelolaan konflik bertujuan untuk menciptakan masyarakat agar hidup damai tanpa kekerasan dengan cara; merangkul, bekerja berdampingan, dan menengahi. Mengelola akibat konflik juga sangat penting terutama bagaimana pemulihan hubungan antara individu, antara anggota dalam masyarakat dan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Pengelolaan konflik pula diperlukan komitmen jangka panjang dan dapat dilakukan melalui berbagai media baik melalui pendidikan, partisipasi politik dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari analisis gender. Tiga teknik analisis gender yaitu Analisis Harvard, Analisis Moser dan Kerangka Pemberdayaan. Pentingnya analisis gender adalah dalam rangka identifikasi kepentingan praktis laki-laki dan perempuan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program pembangunan, dan kepentingan strategis yaitu kesetaraan status, peran, akses dan kontrol antara laki-laki dan perempuan. Analisis kebutuhan praktis dan strategis gender ini berguna untuk menyusun suatu perencanaan ataupun mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan ataupun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

Bimbingan sosial. Berdasarkan pengalaman akademik dan lapangannya yang panjang, seperti apa model bimbingan sosial yang dapat digunakan dalam pengembangan, partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Sasaran

bimbingan sosial adalah modal sosial yang ada dalam masyarakat, kelembagaan sosial dan partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah model dan teknik dalam pengembangan masyarakat maka bimbingan sosial juga memiliki filosofi dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan agar bimbingan sosial dapat mencapai tujuan. Tentunya peranan petugas bimbingan sosial dalam melaksanakan bimbingan sosial tersebut sangat penting dan strategis.

PENUTUP

Penguatan karakter masyarakat merupakan salah satu jalan keluar dalam meningkatkan kualitas hidup warga pemukiman kumuh di Kota Semarang, sebagai kasus di Kelurahan Randusari atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Kampung Pelangi. Wilayah tersebut merupakan salah satu contoh model pembangunan kota yang cukup berhasil, ditinjau dari perubahan lingkungannya saat ini wilayah tersebut sudah menjadi hijau dan ramah masyarakat. Semula wilayah ini merupakan kampung yang kumuh dan sangat tidak layak bagi para pendatang, sebagian warganya terjatuh kemiskinan. Namun keadaan berubah oleh karena komitmen bersama, pengabdian ini ingin mengawal proses pembangunan kualitas hidup masyarakat seperti dimaksud di atas dengan mengadakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal itu juga bermaksud menggugah semangat masyarakat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka sekaligus menguatkan kapasitas mereka untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Dalam hal ini pemahaman tentang konservasi penting diberikan seperti apa yang telah Tim Pengabdian berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman & Ph. Quarles van Ufford, (editor). 1988, *Krisis Tersembunyi dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Djemabut Blaang (Penyunting). 1986, *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djoko Sujarto, Ir. M.Sc.1977. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*. Bandung.
- Eko Budhiharjo, Ir. M.Sc.1986. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Yogyakarta.
- Fox, William F.1994, *Strategic Options for Urban Infrastructure Management*. Washington USA: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Kessides, Christine. 1993. *Institutional Options for Provision of Infrastructure*. Washington USA: The International Bank for Reconstruction and Development.